

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Sitompul, D. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Afandi, R. (2013, Oktober). Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian. *Lex Crimen, II*, 58 - 70.
- Alkostar, A. (2013). *Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan Predicate Crimes*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Alwasilah, C. (2008). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Armanda, R. (2015, Oktober). Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering. *Jom Fisip* , 2, 4.
- Arsyad, A. (2014). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*.
- Atmasasmita, R. (1997). *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* . Jakarta: Binacipta.
- Atmasasmita, R. (2016). Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Journal Teknologi Pendidikan*, 46 - 62.
- Bakhri, S. (2010). *Kebijakan Kriminal: Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: P3IH UMJ dan Total Media.
- Bawono, A. C. (2012, Februari 24). Retrieved Juni 20, 2017, from www.hukumonline.com.
- Belaisha, B. B., & Brooks, G. (2014). Money Landering in Dubai: strategi and future direction. *Journal of Money Laundering Control*, 343-364.
- Berg, B. L. (1992). *Law Enforcement: An Introduction To Police Society Boston, London, Toronto, Sidney, Tokyo*. Singapore: Allyn and Bacon.
- Berg, B. L. (2008). *Criminal Investigation*. New York: Mc Graw-Hill.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* . England: Penguin Brooks .

- BI. (2016). Pemberian Data dan Informasi Bank Indonesia ke PPATK. *Diseminasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bratasena, I. G. (2014, Juni Senin). Retrieved from www.hukumonline.com.
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Condrokirono, N. I. (2009). Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap Berada Di Luar Daftar Non-Cooperative Counter And Territories (NCCTs). *lib.ui.ac.id*, 21.
- CRA. (2007, Juli 17). *Delik Money Laundering Perlu Dibedakan Dengan Penadahan*. Retrieved June 14, 2017, from m.hukumonline.com.
- Creswell, J. W. (2015). Qualitative Inquiry & Research Design. In J. W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Damanhuri, D. S. (2008). Indonesia, Globalisasi Perekonomian & Kejahatan Ekonomi Internasional. pp. 1 - 21.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (1979). Undang-Undang Nomor 1 tentang Ekstradisi.
- Djiwandono, J. S. (2001). *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Pustaka Harapan.
- Durvasula, S., & Lysonski, S. (2007). Money Attitudes, Materialism, and Achievement Vanity: An Investigation of Young Chinese Customers Perceptions. *International Marketing Conference on Marketing & Society*, 6, pp. 497 - m499.
- Eddyono, S. W. (2015). Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Unag di Indonesia. *ICJR*.
- Emzir, P. D. (2010). *Metode penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Erickson, E. H. (1989). *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Esoimeme, E. E. (2017). The Nigerian Money Laundering (Prevention and Prohibition) Bill, 2016: a critical appraisal. *Journal of Money Laundering Control*, 79 - 88.
- Fachruddin, F. (2017, Maret). (F. Fachruddin, Editor) Retrieved Maret 30, 2017, from kompas.com:
<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/03/23/19482151/ppatk.harap.indonesia.jadi.anggota.fatf>

- FAT. (2013, Januari 31). Retrieved juni 15, 2017, from m.hukumonline.com.
- Garnasih, Y. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik. *Musyawahar Nasional dan Seminar Mahupiki* (p. 6). Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Hajaroh, M. (2010). Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Kualitatif. 9.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, C. M. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Harahap, Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, U. (2013). Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran Diri Pada Remaja Putri Bertato di Samarinda. *ejournal.ip.fisip-unmul.org*, 177-186.
- Hendrastomo, G. (2007). Nasionalisme vs Globalisasi "Hilangnya" Semangat Kebangsaan. *DIMENSIA*, 1.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermanto, T. J. (2016). Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Implementasi Di Indonesia. *digilib.unila.ac.id*.
- Husein, Y. (2002). Kebijakan Bank Indonesia tentang Pencucian Uang. *Seminar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002* (pp. 1 - 11). Jakarta: Lembaga Info Naker.
- Husein, Y. (2004). Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Forty-Seven Session of The Comision on Narcotics Drugs*, (pp. 1 - 6). Wina.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. *International Journal of Law*, 1, 1 - 11.
- Husna, A. N. (2015). Orientasi Hidup Materialistis dan Kesejahteraan Psikologi. *Psychology Forum UMM*, 7 - 14.
- Hutabarat, B. B. (2011). Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas. *lib.ui.ac.id*, 21.

- Imelda, R. (2006). *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PT Citra Bakti.
- Iskandar, D. (2012, November 24). Penerapan CDD.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visimedia.
- Jahja, J. S. (2014). *Melawan Money Laundering Mengenal. Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visi Media.
- jdih.ppatk.go.id
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kalalo, F. P. (2016). Efektivitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional. *ejournal.unsrat.ac.id*.
- Kardhianto, I. P. (2015). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 571 - 585.
- Kemal, M. U. (2014). Anti-Money Laundering Regulations and It's Effectitiveness. *Journal of Money Laundering*, 416 - 427.
- Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/ A/ J.A/ 11/ 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/ JA/ 11/ 1994 tentang Administrasi Perkara Pidana
- Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/22/VI/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Reserse Kriminal
- Khairoza, O. (2012). Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Unag Yang Meninggal Dunia Bedasarkan Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010. *lib.ui.ac.id*.
- Khairunisa, U. (2016). Catatan Mengenai Pelanggan, Pelatihan Karyawan, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Efektivitas Kebijakan Anti Pencucian Uang: Kebijakan Bank Indonesia Sebagai Variabel Moderasi. *eprints.undip.ac.id*.
- Kinvall, & Jonson. (2002). *Globalization and Democratization in Asia, The Construction of Identity*. London: Routledge.
- Kitch, E. W. (1983). *Economic Crime in (Encyclopedia of Crime and Justice)*. New York: The Free Press.
- Koker, M. (2014). The FATF's customer identification framework: fit for purpose? *Journal of Money Laundering Control*, 281-295.

- Kurniawan, I. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampak Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *media.neliti.com*, 1 - 14.
- Lamintang, P. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Limbong, A. H. (2014). Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 1 - 19.
- Lyman, M. D. (2005). *Criminal Investigation: The Art and The Science*. New Jersey: Pearson Prentice Hill.
- Madinger, J. (2016). *Money Laundering: A Guideline for Criminal Investigator*. London: CRC Press.
- Makara, T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Compete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Masur, J., & Buccafusco, C. (2013). Innovation and Incarceration: An Economic Analysis of Criminal Intellectual Property Law. *Public Law and Legal Theory Working Papers*.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Movanita, A. N. (2015, November 27). Ini Faktor-Faktor yang Mendorong Pencucian Uang Versi Survei PPAATK. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Mozes, R. A. (2016, April 22). Retrieved Maret 29, 2017, from Kompas.com: <https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/04/22/16552801/JK.Singapura.Tak.Pernah.Mau.Teken.Perjanjian.Ekstradisi.dengan.Indonesia>
- Mugarura, N. (2011). The institutional framework against money laundering and its underlying predicate crimes. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 174 - 194.
- Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. *www.ppatk.go.id*, 1 - 54.
- Nasution, F. M. (2011). Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Seminar Nasional dan Dialog Interaktif* (pp. 1 - 24). Padang: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padang.
- Ngangi, C. R. (2011, Mei). Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial. *Volume 7 Nomor 2*, pp. 1-4.

- Octaviani, B. (2015). Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia. *Journal of International Relations*, 30 - 34.
- OJK. (2016). Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada Penyedia Jasa Keuangan., (pp. 1 -7).
- Paath, C. K. (2017, Januari 31). Retrieved Februari 14, 2017, from tempo.com: <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/31/090841382/bank-indonesia-temukan-612-money-changer-ilegal>
- Pambudi, A. B. (2016). Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *repository.unpas.ac.id*, 25-52.
- Pasaribu, M. R. (2015). Analisis Hukum Terhadap Upaya PT Bank Sumut Cabang Utama Medan. *repository.usu.ac.id*.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Perbawa, I. K. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *ojs.unmas.ac.id*, 1 - 17.
- PPATK. (2016, Desember 02). Perkuat Database Nasabah Terpadu dengan Aplikasi SIPESAT Online. (ES/AA, Ed.) Jakarta. Retrieved Agustus 12, 2017
- Prastomo, Y. (2017, Maret 14). Retrieved Maret 20, 2017, from merdeka.com: <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/dunia/membandingkan-e-ktp-di-indonesia-dan-mykad-di-malaysia.html>
- Prinst, D. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Purnama, C. (2016). Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *USU Law Journal*, 14 - 25.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. (2008). Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-47/ 1.02/ PPATK/ 06.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. (2016). Laporan Tahunan.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. (2016). Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015.
- Ramadhanta, M. (2016). Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika. *digilib.unila.ac.id*.

- Rasyid, A. (2016, Desember). Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbanka. business-law.binus.ac.id.
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Richards, J. R. (1999). *Transnasional Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators*. Florida: CRC Press LLC.
- Riharsya, A. (2014). *Refleksi Kritis Kejahatan Money Laundering dalam Sudut Pandang Kriminologi dan Berbagai Topik Lainnya*. Jakarta: Lulu.
- Rukmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*. Bandung: Alumni.
- Rusli, M. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sanusi, S. (2010). Mewaspadaai Kejahatan Money Laundering. download.portalgaruda.org, 1 - 4.
- Saragih, R. K. (2012). Hambatan Yang Dihadapi Polri Dalam Penanganan Kejahatan Pencucian Uang: Studi Kasus Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. ui.library.ac.id, 29.
- Saroinsong, S. J. (2014, Januari-Maret). Konsep Strategis Perbankan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Vol.II/No.2*.
- Sat, D. M. (2016). Investigation of Money Laundering Method Through Cryptocurrency. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 244 - 254.
- Setiyanto, B. (2011, Jan). Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Money Laundering. *Jurnal Yustisia*, 82, 23 - 32.
- Siahaan, N. (2002). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siahaan, N. H. (2005). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Simorangkir, F. H. (2014). Analisis Yuridis Tentang Penentuan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. repository.usu.ac.id.
- Siswanto, S. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Sjahdeini, S. R. (2002). Memahami Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Seminar Sehari*. Business Reform and Recountraction Corporation & Bank Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2003). Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22, 5.
- Sjahdeini, S. R. (2003). Praktik Pencucian Uang dan Kerugian Negara. *PPATK*. Jakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terrorisme*. Jakarta: Pusat Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (n.d.). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sugianto, & Jiantari. (2014). Akuntansi Forensik: Perlukah Ada Dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi? *jamal.ub.ac.id*, 345-364.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, S. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Supriyadi. (2012, February 21). Retrieved from www.negarahukum.com.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamba, E. S. (2010). *Metode Penelitian Triangulasi*.
- Tarigan, A. (2017, Agustus 7). Kemendagri: 234 lembaga sudah memanfaatkan data Disdukcapil. Retrieved Agustus 12, 2017, from <https://www.google.co.id/amp/m.antaranews.com/amp/645265/kemendagri--234-lembaga-sudah-manfaatkan-data-disdukcapil>
- Tigris, S. (2013). Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *portalgaruda.org*.
- Tong, S., & Bryant, R. P. (2009). *Understanding Criminal Investigation*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Umar, H. (2012, Mei 2). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, 95 - 189.

- Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 128 - 135.
- Wicaksana, M. (2012). Peran dan Fungsi PPATK Dalam Menanggulangi Pendanaan Terorisme Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Formal. *lib.ui.ac.id*.
- Young, M. A. (2014). Dirty Money in Jamaica. *Journal of Money Laundering*, 355-366.
- Yunisa, D. (2012). Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering Di Indonesia Oleh Bareskrim POLRI. *journal.ui.ac.id*.
- Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, M. (2014). *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).